

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap implementasi Public-Private Partnership (PPP) dalam pengelolaan air bersih selama sepuluh tahun terakhir (2014-2024), dapat disimpulkan bahwa:

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Publikasi tentang PPP sektor air mencapai puncaknya pada 2020 (48 artikel), menandai evaluasi tengah periode SDG 6. Terjadi evolusi signifikan dari fokus teknis (2014-2015) menuju tata kelola komprehensif (2016-2018), kemudian ke integrasi teknologi dan manajemen informasi (2022-2024). Amerika Serikat, China, dan Inggris menjadi kontributor utama, menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dalam pengembangan pengelolaan air bersih.
2. Model PPP di perkotaan didominasi oleh struktur formal BOT (25%) dan Konsesi (17,9%) dengan karakteristik transfer risiko ke swasta, investasi modal besar, dan teknologi canggih. Model PPP di pedesaan didominasi oleh Community-Public Partnerships (20%) dengan pembagian risiko merata, fokus keberlanjutan sosial, dan teknologi tepat guna.
3. Pembiayaan di perkotaan mengandalkan pendanaan swasta dan pinjaman dengan risiko lebih banyak dibebankan pada sektor swasta. Sedangkan di pedesaan menggunakan *Output-Based Aid* dan model inovatif seperti *Micro-Franchise* dengan risiko dibagi lebih merata. Akuntabilitas di perkotaan berfokus pada pengawasan pemerintah terhadap sektor swasta, sementara di pedesaan lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

## 5.2. Implikasi

1. Perlunya pendekatan diferensiasi kebijakan berdasarkan konteks perkotaan dan pedesaan. Pembuat kebijakan perlu mengakui bahwa pendekatan "*one-size-fits-all*" tidak efektif mengingat perbedaan signifikan dalam karakteristik sosial-ekonomi kedua wilayah. Kebijakan di wilayah perkotaan dapat lebih berorientasi pada efisiensi dan kapasitas investasi besar dengan model kontraktual formal, sementara di wilayah pedesaan kebijakan harus memprioritaskan aksesibilitas, keterjangkauan, dan partisipasi komunitas. Reformasi kerangka regulasi harus mempertimbangkan perbedaan kapasitas institusional dan dinamika sosial antara kedua wilayah.
2. Manajemen PPP di wilayah pedesaan memerlukan pendekatan berbeda yang menekankan aspek sosial dan kapasitas lokal. Pengembangan kapasitas teknis dan manajerial lokal harus menjadi prioritas melalui program pelatihan berkelanjutan, sistem pendampingan, dan transfer pengetahuan dari operator berpengalaman. Penggunaan teknologi tepat guna yang hemat energi, tahan lama, dan mudah dioperasikan secara lokal menjadi kunci keberlanjutan, contohnya pompa tenaga surya, sistem penyaringan sederhana, atau teknologi pengolahan skala kecil. Model pendanaan campuran yang menggabungkan investasi publik, swasta, donor, dan kontribusi masyarakat dapat mengatasi tantangan keterjangkauan sambil membangun rasa kepemilikan lokal.
3. Partisipasi masyarakat dalam desain dan implementasi proyek air merupakan elemen krusial, terutama di wilayah pedesaan. Melibatkan masyarakat sejak tahap awal perencanaan hingga evaluasi menciptakan rasa kepemilikan yang meningkatkan pemanfaatan dan perawatan sistem. Mekanisme partisipasi harus melampaui konsultasi formal, mencakup pemberdayaan nyata

dalam pengambilan keputusan melalui komite pengelola air lokal, representasi dalam badan pengawas, atau model koperasi air. Metode partisipatif seperti penilaian kebutuhan berbasis komunitas dan pemetaan sosial dapat mengidentifikasi preferensi, kebiasaan, dan pengetahuan lokal yang berharga untuk keberlanjutan program.

4. Sektor swasta diharapkan mengadaptasi model bisnis sesuai konteks lokal, dengan mengembangkan opsi teknologi tepat guna khususnya untuk wilayah pedesaan. Dari segi ekonomi, diperlukan mekanisme finansial inovatif seperti blended finance dan Output-Based Aid untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan. Struktur tarif juga perlu dirancang secara berbeda, di mana urban fokus pada efisiensi penggunaan dan pemulihan biaya, sementara rural lebih menekankan keterjangkauan dan keberlanjutan sosial. Pendekatan bundling proyek-proyek kecil di rural menjadi solusi potensial untuk mencapai skala ekonomi yang lebih menguntungkan.

